

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Modalitas Politik

Penelitian yang dilakukan oleh Miranti dan Suryani (2023) dengan judul “Modalitas Jariah, S.Pd dalam Memenangkan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022”. Hasil dari penelitian ini bahwa modal politik yang membuat beliau berhasil memenangkan pilkades ialah ketokohan Jariah S.Pd di dalam masyarakat, popularitas serta modal ekonomi yang membuat tim sukses berhasil memberikan calonnya untuk memenangkan pilkades serentak di Kabupaten Merangin tahun 2022 lalu.

Doe, dkk. (2020) menyatakan bahwa pertarungan di panggung politik harus mengedepankan modalitas karena akan banyak memberikan sumbangsih bagi calon kandidat untuk meraih kemenangan, karena pada konteks ini semakin kuat modal yang dimiliki akan semakin banyak juga peluang yang akan diraih untuk memenangkan kontestasi, kerumitan dari arena pemilihan akan menjadi acuan bagi calon kandidat agar tidak hanya berpacu pada satu modal melainkan dibersamai dengan modal-modal lain yang lebih menguntungkan.

Pemilihan kepala desa merupakan bagian dari proses dalam sistem demokrasi langsung, dimana pemilih memilih satu atau lebih calon dan pemenangnya ditentukan oleh jumlah suara terbanyak. Dalam sistem demokrasi

saat ini, setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai presiden suatu daerah. Mereka juga mempunyai kebebasan yang besar untuk membentuk koalisi atau organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya dan berpartisipasi dalam kegiatan politik.persaingan untuk menduduki posisi publik yang diinginkan. Konsep teori modalitas yang diwakili oleh Pierre Bourdieu tidak dapat dipisahkan dari konsep kekuasaan lainnya, oleh karena itu pemikirannya erat kaitannya dengan konsep kekuasaan lain seperti habitus dan imperium (arena). Dalam konteks sosiologi, habitus mengacu pada struktur mental dan kognitif yang menghubungkan individu dengan dunia sosialnya. Setiap individu diasumsikan mempunyai seperangkat skema yang terinternalisasi yang digunakan untuk membentuk persepsi dan memahami serta mengevaluasi lingkungan sosialnya. Sebaliknya, lapangan atau arena merupakan jaringan hubungan antar posisi obyektif yang ada di dalamnya, dan keberadaannya terpisah dari kesadaran dan kemauan individu. Hubungan tersebut bukan sekedar interaksi antar individu, namun menciptakan struktur yang mempengaruhi status dan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam ranah ini, baik individu maupun organisasi dapat menduduki jabatan-jabatan yang ditentukan oleh struktur sosial yang ada.

Di dalam perebutan kekuasaan, dapat dipastikan bahwa modalitas merupakan sebuah kekuatan utama bagi setiap individu yang sedang merebutkan kekuasaan agar mendapat kekuatan di lingkungan sosial yang disebut sebagai arena kekuasaan. Modalitas menjadi langkah awal agar terbentuknya sebuah strategi baik dalam perebutan dan juga mempertahankan kekuasaan yang tepat bagi setiap

kandidat yang akan maju di arena kekuasaan. Dalam pilkada, yang merupakan kompetisi politik, kandidat yang memiliki modal yang kuat memiliki peluang besar untuk menang. Kandidat yang ingin berpartisipasi dalam pilkada langsung membutuhkan modal politik, sosial, dan ekonomi. Pasangan calon kepala daerah yang mengakumulasi lebih dari satu jenis modal memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih. Semakin banyak modal yang berhasil dikumpulkan oleh pasangan calon, semakin besar kemungkinan mereka untuk terpilih sebagai kepala daerah. Pasangan kandidat yang terpilih tidak dapat dianggap sebagai akibat dari satu faktor atau modalitas karena merupakan bagian dari proses yang rumit. Pierre Bourdieu membagi modalitas menjadi beberapa bagian diantaranya ialah *Sosial Capital*, *Economic Capital*, *Symbolic Capital* dan *Cultural Capital* yang mana bagian-bagian ini akan tergambar dalam basis yang diunggulkan, ini merupakan sebuah persyaratan yang tidak dapat dihindarkan bagi sang calon untuk memenangkan pertarungan politik. Pierre Bourdieu menyatakan dalam bukunya yang berjudul *The Forms of Capital* bahwa modalitas tersebut digunakan sebagai strategi politik bagi sang calon yang bertarung dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah (labolo, 2006; Sadawi, 2011). Menurut Bourdieu, modal berfungsi menjadi relasi sosial pada suatu sistem pertukaran, dan konsep ini meluas pada berbagai bentuk barang, baik materi maupun simbolis, yg disebut langka serta bernilai pada konteks sosial tertentu. Agar suatu ranah bisa memiliki makna, modal wajib terdapat di dalamnya. Penjelasan ini juga dapat dipahami melalui pendekatan generatif, meskipun cenderung bersifat artifisial namun tetap berguna. Hubungan antara ranah, habitus, dan modal bersifat pribadi; nilai dari modal terkait

menggunakan ciri sosial dan budaya yang ada dalam habitus. Bourdieu menyebut beberapa jenis modal yang diketahui pada ranah-ranah eksklusif dan yang diserap ke dalam habitus, sementara sebagian besar jenis modal ini pula dihasilkan berasal dasar material. Menurutnya, modal juga berfungsi sebagai basis dominasi. Banyak jenis modal yg dapat bertukar satu sama lain, sehingga modal secara umum bersifat tukar. Tukaran yang paling dramatis ialah tukaran pada kapital simbolik, sebab dalam wujud ini, modal yang berbeda dipandang serta diakui menjadi sah di mata hukum

Namun menurut Kacung, (2006) yang biasa sering digunakan atau yang berperan dalam menentukan kekuasaan sosial ialah Modal Budaya, Modal Ekonomi dan juga Modal Sosial yang dirasa terlihat lebih menonjol serta sering mendapatkan perhatian dari masyarakat yang langsung merasakan. Semakin besar akumulasi yang digunakan oleh seorang calon maka semakin besar dukungan yang didapatkan.

Dalam konteks pemilu dimana merupakan sebuah wadah bagi para elit berkompetisi untuk jabatan politik di pemerintahan. Para politisi harus memiliki sejumlah keunggulan. Jika kita mempertimbangkan persentase kandidat yang diusung dan didukung oleh partai politik, atau koalisi partai, hasil kursi atau suara pemilu legislatif untuk masing-masing pasangan kandidat dapat berbeda. Bahkan, beberapa pasangan kandidat mendapatkan dukungan suara dari partai yang lebih besar atau lebih berkuasa. Begitu juga berlaku untuk kepala desa yang mana memiliki banyak suara partai tidak menjamin seorang kandidat akan menang dalam pilkkades secara langsung. Pengaruh figur kandidat lebih penting dalam pilkkades,

dan koalisi partai, atau persaingan antar partai, tidak terlalu terlihat. Dalam pemilihan kepala desa, persaingan lebih terjadi antar kandidat daripada antar partai, sehingga peran figur kandidat sangat penting. Maka dengan begitu modalitas tersebut dapat dielaborasikan menjadi berikut:

a. Modal Politik

Kandidat yang ikut serta dalam mencalonkan akan berpartisipasi pemilihan di arena pilkada atau pemilu lainnya. Partai politik merupakan organisasi politik yang bertugas untuk mengajukan kandidat dalam pemilu untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan dan kemudian dipilih oleh rakyat. Fungsi dari partai politik hanya mampu mengusung nama saja yang hal itu tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena bersifat relatif kecil sehingga calon yang akan maju harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan relasi untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi yang lebih menonjol terhadap pengaruh figure kandidat. Pemilu merupakan suatu sarana yaitu menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Tidak ada yang benar-benar jelas tentang definisi modal politik dalam ilmu sosial, dan hanya sedikit literatur yang membahas konsep ini dibandingkan dengan modal simbolik, sosial, budaya, dan ekonomi. Pierre Bourdieu, sosiolog Perancis yang hidup pada (1930-2002), adalah tokoh penting dalam penelitian tentang berbagai jenis modal. Namun, kritik sering menyatakan bahwa Bourdieu memiliki pendapat yang terlalu deterministik dan tidak berfokus pada realitas empiris saat membangun teorinya.

Akibatnya, pada analisis Bourdieu mungkin tidak sempat menjadwalkan analisis lengkap tentang modal politik, meskipun dinamika akumulasi dan penggunaannya sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari.

Menurut Casey (dalam Sudirman Nasir 2009) yang menjelaskan bahwa modal politik diartikan sebagai kemampuan pelaku politik yang menghasilkan keuntungan sebagai seorang pemimpin yang bersangkutan. Modal politik menjadi salah satu faktor kepemimpinan yang merujuk pada sumber daya, dukungan serta kekuatan politik yang dimiliki setiap pemimpin atau kelompok politik tertentu dengan diperlukan adanya kepemimpinan yaitu legitimitas, dukungan politik, daya tawar, stabilitas politik, adanya implementasi kebijakan hingga representasi dan partisipasi di dalam proses politik. Casey lebih lanjut mendalami adanya pasar-pasar yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik diantaranya ialah, pasar politik sebagai instrumen dasar sebagai pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, berikutnya ialah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar ketiga ialah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Keempat, pendapat dan pandangan umum mengenai pelaku politik atau lembaga politik tersebut.

J. Misra dan A.Hick (1993) menyatakan bahwa modal politik ialah berbagai fokus pemberian kekuasaan serta sumber daya untuk merealisasikan agar tercapainya hal-hal yang dapat mewujudkan

kepentingan dalam meraih kekuasaan. Sedangkan menurut J.A. Booth dan P.B. Richard yang mengartikan bahwa modal politik sebagai aktifitas warga negara agar tercapainya kekuasaan serta demokrasi. Maka dengan begitu modal politik diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, yang kemudian akan berkontribusi terhadap keberhasilan kementiasinya dalam proses pemilihan umum.

Modal politik akan memperkuat legitimasi seorang pemimpin, jika sudah mendapatkan sebuah kepercayaan dari masyarakat maka akan jauh lebih mudah bagi pemimpin tersebut mengambil keputusan yang diterima langsung oleh masyarakat. Dukungan politik juga akan mempermudah menjalankan pemerintahan baik berupa dukungan dari partai politik atau kelompok politik lainnya karena jika melalui tanpa adanya dukungan maka seorang pemimpin akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan langkah yang sebelumnya diinginkan. Dukungan dari elit partai politik akan berperan lebih menonjol serta memiliki jangkauan bidang yang lebih berpengaruh besar, selain dengan itu kapasitas sebagai seorang calon juga harus berkualitas dengan contoh kedudukannya di dalam partai harus berada di dalam struktur jabatan yang strategis. Biasanya dukungan elit partai kepada figur hanya memberikan keunggulan seperti popularitas, kapabilitas, serta moralitas yang baik. Sebaliknya, jika kandidat tidak mendapatkan dukungan dari elit partai politik maka calon dapat dipastikan akan kalah dalam arena permainan politik sebab sumber daya baik kemampuan internal dan eksternal harus dipersiapkan dan dikembangkan

secara berkelanjutan. Setiap kontestan harus mampu memastikan bahwa mesin partai politik serta jajarannya selalu bekerja dengan maksimal dan berpihak padanya agar terealisasinya hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan teraihnya kekuasaan.

Perjuangan politik bergantung pada dua faktor yang sedang berjalan dalam kekuatan politik simbolik, yaitu layanan sebuah tindakan performatif, modal sosial simbolik ialah sebuah kekuatan untuk menciptakan grup politik agar mendapatkan manfaat untuk memobilisasi masa, dimana kekuatan harus berdasarkan sejumlah modal simbolik atau dengan kata lain kekuatan untuk mempengaruhi pikiran orang lain, pengakuan yang diberikan dan diterima. Faktor yang kedua, efektivitas dari persepsi simbolik akan sangat bergantung pada penyesuaian objek dari pihak yang berdiskontruksi dengan pihak lain yang berpresepsi sosial. Dengan begitu, perjuangan politik merupakan sebuah bentuk perjuangan yang berusaha mengangkat atau menyembunyikan kebenaran apiori yang pernah ada sebelumnya.

b. Modal Ekonomi

Modal ekonomi merujuk di dukungan ekonomi berupa dana politik, yg dapat berasal melalui sumber-sumber eksklusif dan donatur. Dana ini dipergunakan buat membayar partai politik, mendanai kampanye, serta membeli suara demi memenangkan pemilihan umum. Herman Sulistiyo (2000:20) berpendapat bahwa uang menjadi salah satu modal politik yang digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan kekuasaan politik. Yang

dimaksud disini ialah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh calon kepala desa akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah kebutuhan diri yang bersangkutan sehingga dapat membawa pengaruh nantinya akan mampu memenangkan pertandingan pemilihan kepala desa. Dalam konteks modal ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan, pemilik modal memiliki keunggulan dalam membiayai jaringan sosial yang dapat menambah personalitas yang lebih banyak serta untuk menambah pembiayaan kampanye politik. Modal ekonomi memiliki peran yang sangat penting sebagai pelumas utama mesin politik yang digunakan karena sebagian besar membutuhkan biaya politik politik yang sangat besar seperti mencetak baligho, spanduk, menerbitkan iklan, kampanye melalui barang fisik seperti kaos, jaket, topi atau berbagai kebutuhan lainnya.

Ahli ekonomi John Stuart Mill pada buku *Principle of Political Economy* (1848) menurunkan istilah "modal" dengan dua makna primer: (1) barang fisik yang digunakan untuk menghasilkan produk baru, dan (2) dana yang tersedia buat mempekerjakan pekerja. Di akhir abad ke-19, konsep barang fisik tersebut dijadikan galat satu asal empat faktor produksi utama beserta-sama menggunakan tanah, tenaga kerja, dan manajemen.

Konsep modal ekonomi mulai dengan memahami apa itu mata uang, yang memiliki nilai ekonomis. Dari perspektif ekonomi, modal juga dapat berupa investasi yang diberikan kepada pihak lain untuk ditukar dengan keuntungan dalam bentuk barang atau layanan. Modal ekonomi adalah aset yang dianggap milik individu atau grup yang bekerja dalam bidang

ekonomi. Modal ekonomi biasanya diwakili dengan harta atau uang yang dimiliki seseorang atau kelompok, seperti perusahaan atau organisasi (Esha, 2012: 16).

Modal Ekonomi menjadi prasyarat utama bagi calon karena segala bentuk biaya bukan berasal dari partai yang mencalonkannya. Seorang kandidat harus membayar partai politik untuk ikut serta dalam kontestasi politik lokal, terutama jika dia bukan kader partai. Ini menunjukkan betapa pentingnya modal ekonomi dalam politik. Menurut Pantow (2012: 30), modal ekonomi mencakup dukungan finansial berupa dana politik yang diberikan oleh donator dan sumber pribadi selain digunakan untuk membayar kampanye, partai politik, dan membeli suara untuk memenangkan pilkada. Waktu yang pendek untuk menyebarluaskan informasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ini sebagai jalur pintas yang mempermudah kelancaran kampanye, Bourdieu menyatakan bahwa meskipun dapat dengan mudah dikonversikan dalam bentuk uang, namun dalam kondisi tertentu ternyata modal budaya juga dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi seperti kualifikasi pendidikan yang dapat dilembagakan. Maka dengan begtiu modal sosial dapat dikonversikan ke dalam modal ekonomi dan dapat dilembagakan dalam bentuk gelar kesarjanaan (Syahra, 2003:3).

Para ahli ekonomi neo-klasik, misalnya Alfred Marshall pada bukunya "Prinsip-prinsip Ekonomi" tahun 1890, menggunakan perspektif ini. Kapital dalam konteks ekonomi tak jarang diasosiasikan dengan

gagasan kapitalisme serta seluruh kontroversinya. Modal politik dan ekonomi saling terkait dalam situasi politik yang menekankan interaksi spontan, seperti komunikasi yang singkat antara pemilih dan calon politik. Periode waktu yang singkat pada proses pengenalan menjadi calon politik mempertinggi penggunaan modal ekonomi menjadi alternatif. Fenomena ini banyak terjadi pada negara-negara berkembang yang masih dalam tahapan transisi menuju pemilu yang rasional dan pembentukan pemilih yang rasional. Modal politik dan ekonomi saling terkait dalam konteks politik yang menekankan interaksi cepat antara pemilih serta calon politik. Ketika waktu untuk sosialisasi menjadi calon politisi singkat, penggunaan modal ekonomi sebagai jalur yang lebih simpel. Situasi ini sering terjadi pada negara-negara berkembang yang sedang bertransisi menuju pemilu yg lebih rasional dan membentuk pemilih yang lebih rasional.

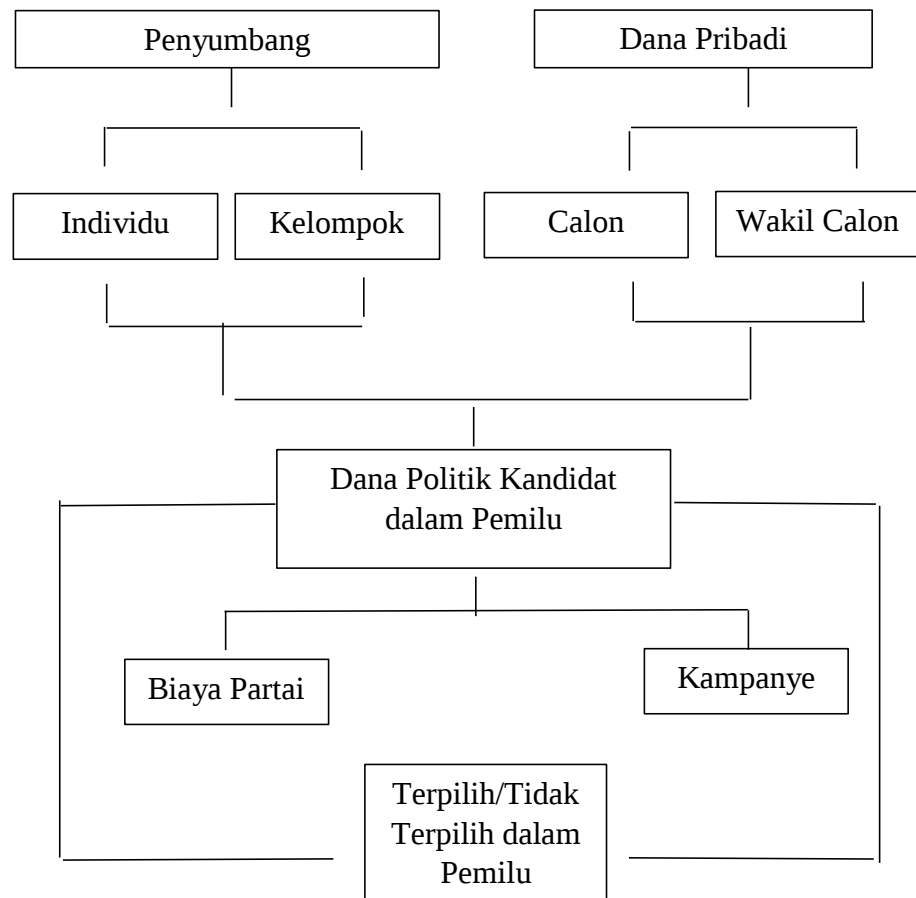
Alur dari penggunaan politik uang ialah dana politik bagi kandidat berasal dari dana pribadi serta sumbangan berasal simpatisan (donatur), baik individu juga perusahaan. Dana tersebut dipergunakan buat membayar partai, mendanai kampanye, dan membeli suara. Pengeluaran dalam sistem pilkada mampu sangat tinggi karena kontestasi yg terbuka dan kompetitif. Selain itu, pemilih seringkali terpengaruh oleh besarnya dana politik yg dimiliki oleh kandidat. Hal ini membentuk proses pilkada menjadi sangat mahal, mulai berasal tahap persiapan sampai kampanye, mobilisasi, serta kebutuhan biaya politik lainnya. Besarnya kapital yang dimiliki kandidat

menjadi alasan bagi partai politik untuk mendukung kandidat tadi dan memanfaatkan kekuatan modal yg ada.

Sahdan dan Haboddin (2009) menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memerlukan "dana politik" untuk menutupi biaya kegiatan tersebut. Istilah dana politik dapat dibedakan berdasarkan asal dan penggunaannya, yaitu:

1. Dari segi sumber, dana politik asal dari sumbangan pasangan calon dan dukungan berasal para simpatisan (donatur), baik individu maupun perusahaan. Dana politik juga dapat dipahami sebagai bentuk nyata partisipasi serta dukungan rakyat terhadap pasangan calon kepala wilayah.
2. Berasal sisi penggunaan, dana politik dibedakan berdasarkan tujuan pengeluarannya, yang meliputi pengeluaran buat kegiatan rutin partai politik serta pengeluaran untuk kampanye. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, penggunaan dana politik oleh pasangan calon tidak hanya terbatas di pengeluaran kampanye seperti mencetak brosur, pergerakan, biaya transportasi, konsumsi, cetak kaos, poster, dan iklan. Tetapi, pula mencakup pengeluaran untuk membayar partai politik yang dijadikan kendaraan politik dan membeli suara masyarakat.

Berikut merupakan alur kampanye serta pihak yang terlibat didalamnya:



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015

Gambar 2. 1 Bagan Dana Kampanye

c. Modal Sosial

Modal sosial merupakan asal daya yang dimiliki oleh individu atau kelompok, yg mencakup agama, tata cara-tata cara sosial, serta jaringan sosial. Sumber daya ini memungkinkan terjadinya kerjasama pada antara mereka. Teori modal sosial ialah teori yang paling jelas dan dapat diringkas pada dua kata: soal korelasi. Dengan menciptakan serta memelihara korelasi menggunakan orang lain, individu dapat bekerja sama untuk mencapai berbagai tujuan yang sulit dicapai sendiri atau yang mungkin bisa dicapai

tetapi menggunakan lebih banyak usaha. Orang berinteraksi melalui jaringan, serta mereka cenderung memiliki nilai-nilai yg sama menggunakan anggota lain pada jaringan tersebut. Oleh sebab itu, jaringan ini bisa diklaim sebagai asal daya yang berfungsi menjadi modal (Field, 2010:1)

Modal sosial biasanya mempunyai fokus yang jelas untuk menghindari ambiguitas makna. Penerapan fokus ini melibatkan tiga aspek utama. Pertama, modal sosial berkaitan dengan institusi, norma, nilai, adat istiadat, gaya hidup, dan kode etik. Kedua, pola pengelolaan modal sosial yang dianalisis mempunyai nilai produktif dalam menciptakan kohesi sosial. Ketiga, makna modal sosial hanya dapat dipahami dalam konteks interaksi dengan lingkungan eksternal, yang harus mencakup proses negosiasi dan adaptasi. Hal ini menyebabkan orang lain menafsirkan kembali modal sosial.

Menurut Pierre Bourdieu yang menyatakan bahwa saling kenal serta saling mengakui merupakan jaringan hubungan kelembagaan yang berkaitan dengan keseluruhan sumberdaya dalam modal sosial itu sendiri. Ia mendefinisikan bahwa modal sosial merupakan sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang yang berasal dari kelembagaan dengan berlangsung secara terus menerus dalam bentuk timbal balik serta pengakuan. Besar kecilnya modal yang diperoleh bersumber dari seberapa jauh kuantitas jaringan hubungan yang diciptakan serta besaran volume modal ekonomi, sosial budaya yang dimiliki oleh setiap orang yang ada di

dalam jaringan hubungannya. Bourdieu juga menegaskan bahwa institusi lokal pastinya akan berhubungan baik dengan ekonomi, budaya serta modal sosial. Ia menegaskan bahwa modal sosial ini mengacu terhadap keuntungan serta kesempatan yang didapatkan oleh seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu seperti kelompok arisan, paguyuban, dll.

Hasil penelitian yang dilakukan Karim (2014:4) menunjukkan bahwa modal sosial, khususnya jaringan yang diciptakan dengan para wirausahawan, merupakan modal utama dalam setiap persaingan politik. Modal sosial ini kemudian ditransformasikan menjadi modal ekonomi yang berfungsi sebagai fasilitator kampanye dan mobilisasi massa. Dalam konteks ini, modal ekonomi pribadi para kandidat seringkali tidak mencukupi tanpa dukungan jaringannya.

Menurut Francis Fukuyama modal sosial diartikan sebagai kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian yang menjadi pembeda di dalam dirinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang didahulukan di lingkup yang kecil atau yang paling mendasar karena modal sosial berada dengan modal manusia sejauh dimana ia telah diciptakan melalui mekanisme kultural seperti tradisi, agama dan sejarah. Bagi Fukuyama, modal sosial merupakan kemampuan yg timbul dari kepercayaan umum pada suatu masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Modal sosial bisa terlembagakan pada kelompok sosial yang paling kecil dan mendasar. Berbeda dengan modal manusia (human capital),

kapital sosial dapat diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme budaya mirip kepercayaan, tradisi, atau sejarah. Modal sosial mencakup dukungan dari figur kandidat yang memiliki ketokohan, sehingga kepercayaan masyarakat bisa menciptakan interaksi sosial serta menghasilkan jaringan-jaringan yang mendukung.

Michael Woolcock (dalam Dwi Rajibianto, 2010) mengidentifikasi 3 jenis modal sosial menjadi berikut:

1. Sosial Bounding: Ini meliputi budaya nilai, persepsi, serta tradisi atau tata cara tata cara. Modal sosial dengan ciri ini ditandai sang ikatan yang kuat pada suatu komunitas, di mana sistem kekerabatan dan pertemanan masih berlaku. Hal ini membangun rasa simpati, tanggung jawab, agama timbal kembali, dan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya yang diyakini. Tradisi berfungsi menjadi panduan perilaku yang kokoh dan mempunyai integrasi yang kuat pada pola sikap masyarakat, serta memberikan sanksi bagi pelanggar.
2. Social Bridging: Ini melibatkan institusi serta prosedur yang menciptakan ikatan sosial sebagai respons terhadap banyak sekali ciri kelompok. ada pula keterlibatan masyarakat secara umum sebagai masyarakat negara, asosiasi, serta jaringan.
3. Social Linking: Ini merujuk di korelasi atau jaringan sosial yg menghubungkan aneka macam taraf kekuatan sosial atau status sosial dalam warga.

Hasbullah (dalam Niken Handayani, 2006), modal sosial ialah kemampuan masyarakat pada sebuah entitas atau kelompok buat bekerja sama dan membentuk jaringan guna mencapai tujuan beserta. Kerjasama ini didasarkan di pola interrelasi yang saling menguntungkan hingga adanya imbal balik, serta dibangun atas kepercayaan yg ditopang oleh tata cara-norma dan nilai-nilai sosial yg positif dan kuat. Kekuatan modal sosial ini akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif pada membuat jalinan korelasi berdasarkan prinsip-prinsip imbal balik, saling menguntungkan, dan kepercayaan.

Abdullah (dalam Suwartiningsih, Sri & Prananingrum, Dyah Hapsari, 2009:43) mengidentifikasi tiga bentuk kapital sosial yang ada pada masyarakat, yaitu:

1. Ideologi dan Tradisi Lokal: Ini merujuk di keyakinan eksklusif yg menghipnotis cara hidup dan memilih struktur sosial. Bentuknya bisa berupa agama lokal yg menjadi dasar legitimasi tindakan sosial, ajaran yang dijadikan panduan dalam perilaku, etika sosial yang mengatur interaksi antar manusia, etos kerja, nilai-nilai tradisi, dan adat-norma yg berfungsi menjadi aturan sikap.
2. Hubungan serta Jaringan Sosial: Ini meliputi pola hubungan antar individu dan ikatan sosial pada masyarakat, mirip kerabat atau tetangga.

3. Jaringan dalam warga: Ini meliputi institusi lokal yang berfungsi untuk kepentingan kelompok dan masyarakat. Misalnya ialah lembaga tata cara atau pranata sosial yg berperan baik secara eksklusif juga tidak eksklusif.

Modal sosial bisa seorang calon bisa dilihat seperti profesi, organisasi, pendidikan, agama, adat atau dengan ketokohnya di dalam masyarakat itu sendiri, aspek ini mesti dimiliki oleh setiap calon sebagai mobilisasi dukungan politik dari warga serta guna membangun modal sosial. Dengan membangun relasi sosial melalui kunjungan informal agar tumbuhnya kedekatan personal serta kepercayaan publik yang dapat meyakinkan kepentingannya seorang figur dalam mempresentasikan setiap personal kontestan. Layaknya dengan pengaruh ketokohan serta popularitas yang akan dengan mudah membangun relasi serta kepercayaan publik karena dalam politik yang masih menjunjung tinggi nilai demokrasi tingkat kepercayaan publik menjadi dasar untuk memperoleh kekuasaan demikian modal sosial yang akan sangat menentukan kemenangan. Dengan begitu seluruhnya saling berkaitan serta saling melengkapi. Konsep modal sosial mencakup korelasi sosial, institusi, tata cara-istiadat sosial, dan kepercayaan antara individu atau kelompok lain, yg semuanya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kehidupan pada komunitas.

Kepercayaan dipergunakan untuk meraih posisi eksklusif oleh individu atau kelompok yang diklaim bisa dianggap sesuai keyakinan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, masyarakat dengan cepatakan

kehilangan kepercayaan pada pemegang kekuasaan tersebut. Faktor-faktor seperti ketokohan, popularitas, serta latar belakang pendidikan serta pekerjaan kandidat sangat berpengaruh dalam memilih kemenangan dalam pemilihan kepala daerah. Untuk membentuk hubungan serta menerima kepercayaan masyarakat, seorang kandidat perlu mempunyai pengaruh tersebut. Para pakar membagi definisi modal sosial menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menekankan pada jaringan korelasi sosial, sementara kelompok kedua lebih fokus pada karakteristik yg melekat pada individu yang terlibat pada hubungan sosial.

Dalam pemilihan kepala daerah, modal sosial sangat penting dan berinteraksi dengan jenis modal lainnya. Modal sosial tercermin dari dukungan figur kandidat karena ketokohan mereka, sehingga masyarakat percaya padanya dan membentuk jaringan yang mendukung. Latar belakang sosial seorang kandidat dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, posisi pekerjaannya, dan perannya dalam masyarakat semua ini adalah modal sosial yang penting. Modal sosial ini berperan dalam membangun hubungan dan memperoleh kepercayaan masyarakat, yang juga dapat menjadi sumber kekuasaan. Dengan modal sosial yang kuat, seorang kandidat dapat melakukan pendekatan fisik dan sosial kepada masyarakat. Dengan memiliki modalitas yang kuat, seorang kandidat dikenal oleh masyarakat dan dapat dipercaya.

Robert D. Putnam (1993) menyatakan bahwa modal sosial merupakan suatu *mutual trust* antara pemimpin dengan anggota masyarakat.

Hal ini melibatkan sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama, yang melingkup jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial. Dalam modal sosial ini peneliti melihat latar belakang sosial seorang kandidat dalam menentukan kedudukan sosialnya, baik dalam tingkat pendidikan atau kedudukan sosialnya ditengah masyarakat. Contoh sederhana ialah ketika seorang kandidat dilihat dari pekerjaan awal, jika status makin meningkat maka status sosial ditengah masyarakatnya sangat bagus. Jadi sebenarnya antara modal sosial dengan modal politi akan sangat membantu dalam membuka peluang memenangkan kontestasi politik, yang mana modal sosial akan membantu kinerja-kinerja politik untuk mengangkat isu-isu hak dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan politik seperti memobilisasi suara pemilih, partisipasi langsung dengan masyarakat, lobi, atau dengan membangun wacana sebagai modal politik untuk menuju demokrasi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa modal sosial memiliki implikasi langsung terhadap adanya modal politik, sebab modal sosial membentuk realitas modal politik secara tidak langsung, dimana peran seseorang yang memiliki modal sosial akan membentuk realitas modal politik tanpa sengaja sedangkan seseorang yang memprioritaskan modal politik akan langsung sekuat mereka untuk menguasai modal sosial.

Menurut James Coleman (1999) yang mendefinisikan bahwa modal sosial memiliki beberapa ciri yaitu yang berupa aspek dari struktur sosial dengan ikut serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam konteks ekonomi, modal sosial dapat berbentuk citra yang

mewujudkan kepercayaan dalam kejujuran. Seorang wirausahawan yang berhasil memiliki etika wirausaha seperti kejujuran, suka membantu, bertanggung jawab, mengejar keunggulan dan menepati janji akan menumbuhkan kepercayaan dari waktu ke waktu serta memfasilitasi tindakan-tindakan terkoordinasi dalam berbagai bidang kehidupan.

d. Modal Budaya

Modal Budaya merupakan salah satu jenis modal yang berperan penting juga dalam kontestasi di arena politik, jenis yang mencakup modal ini ialah adanya perolehan pengetahuan seperti cara bergaul, cara pembawaan, relasi yang berperan didalam penentuan kedudukan sosial, hal ini didapatkan dari oleh kondisi keluarga dan pendidikan, modal budaya juga memiliki batas yang dapat beroperasi secara independen dari tekanan biaya dan memberikan kompensasi bagi kekurangan uang sebagai bagian dari strategi individu untuk meraih kekuasaan serta status.

Individu memperoleh modal budaya melalui proses internalisasi yang dimulai semenjak masa kanak-kanak, utamanya melalui ajakan orang tua serta pengaruh lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, modal budaya ditentukan oleh lingkungan sosial yang kompleks dan pendidikan yang diderita oleh individu, termasuk baik pendidikan formal juga warisan keluarga. Individu umumnya memahami tentang modal dan budaya secara tak sadar, sebab cara demikianlah yang membuatnya berfungsi secara efektif. Modal budaya, memungkinkan memperoleh kesempatan dalam hidup, karena dipastikan bahwa modal budaya dapat menghasilkan

kesetaraan atau ketidaksetaraan yang akan termotivasi bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu kelas sosial tertentu. Modal sendiri akan diperoleh oleh individu dengan sendirinya jika individu tersebut memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya.

Menurut Bourdieu bahwa modal budaya memiliki rentangan yang sangat luas, selain dari properti, seni, pendidikan atau bentuk-bentuk bahasa, dengan begitu hal ini menunjukkan bahwa modal budaya tidak hanya terbatas dalam aspek material tetapi juga simbolik yang akan memberikan nilai tambah dalam arena kontestasi politik. Misalnya, calon kepala desa yang akan terpilih memiliki *background* seorang santri dan orang tua yang menjadi pemilik sebuah pesantren ternama hal itu menjadi faktor yang signifikan dalam penentuan kedudukan sosial.

Wujud dari modal budaya ini yang dihasilkan ialah ijazah pendidikan yang ditempuh atau bisa juga dengan pendidikan dan pengetahuan yang selama ini diperoleh, kemampuan untuk menulis atau semacam gaya bicara dan bergaul yang pembawaannya dapat menentukan. Menurut Bourdieu terdapat tiga bentuk modal budaya diantaranya sebagai berikut:

1. Terinstitutionalisasi, yang berarti bahwa gelar pendidikan diakui secara sah oleh suatu institusi dapat menjadi anggota ilmuwan atau tim peneliti suatu lembaga.

2. Objektif, karya seni/buku (kekayaan budaya) bisa dimiliki secara material untuk membedakan pemilikan simbolis.
3. Terintegrasi di dalam diri, dimana hal ini dapat diartikan bahwa pengetahuan yang diperoleh selama proses studi dan disampaikan melalui pengetahuan di lingkungan sosialnya disampaikan hingga membentuk disposisi yang dapat tahan lama.

Bourdieu memandang modal sebagai basis dominasi. Modal diartikan sebagai jenis yang dapat ditukar, penukaran ini semacam penukaran simbolik karena dalam hal ini modal berbeda persepsi sebagai legitimate. Dalam proses pilkada dalam arena kontestasi politik dengan terpilihnya kandidat yang memiliki modalitas terbangun. Sebab dengan ketiga modal itu pasangan yang memiliki akumulasi lebih dari satu modal akan berpeluang terpilih sebagai pemimpin. Maka dengan terpilihnya pasangan kandidat merupakan sebuah peluang yang kompleks tidak dapat dikatakan sebagai hasil yang hanya dari salah satu faktor saja untuk kemenangannya. Modalitas sangat berkaitan dengan penentuan kemenangan, karena itu sangat melekat dengan yang dimiliki oleh kandidat dalam mengikuti kontestasi politik yang hanya tidak modal saja melainkan dengan dukungan politik ekonomi serta aktor-aktor yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan politik.

2.1.2. Pemilihan Kepala Desa

Dalam konsep demokrasi *prototype* pemilu langsung, pilkades dipahami sebagai bentuk adanya pengakuan terhadap keanekaragaman, partisipasi oleh masyarakat dan sikap politik masuk kedalam bingkai demokratisasi di tingkat desa. UU No. 6 Tahun 2014 pasal 31 menyebutkan bahwa pilkades dilaksanakan dengan serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota, dengan hal tersebut mengamanatkan bahwa kebijakan teknis pilkades melalui Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah dilaksanakan secara serentak. Berpijak pada pasal 39 UU No. 6 Tahun 2014 bahwa kepala desa yang menjadi unsur penyelenggaraan dipilih melalui pemilu secara langsung oleh penduduk desa dengan terpenuhinya persyaratan yang berlaku dengan masa jabatan selama enam tahun dan menjabat paling banyak tiga kali berturut-turut/tidak secara berturut-turut.

Pemilihan kepala desa merupakan sebuah sistem pemilihan negara yang menyentuh langsung masyarakat yang bisa membebaskan warga negara untuk memilih hak berpendapat, bebas untuk memilih juga tidak akan pernah terlepas dari kaidah undang-undang yang sudah tertera dengan dilaksanakan langsung oleh warga yang sudah siap untuk memilih. Asas Pilkades memiliki asas yang sama dengan Pemilu dirumuskan dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang berlangsung di Indonesia, dengan tujuan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, memberikan kepastian hukum agar tercegahnya duplikasi dalam pemilu, agar terciptanya pemilu yang efektif dan mewujudkan pemilu yang berintegritas. Berikut merupakan asas

yang diterapkan untuk melaksanakan pemilu yang demokratis serta transparan, yaitu:

1. Asas Langsung

Rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan keinginan dan kehendak hati nuraninya. Hal ini bertujuan untuk terwujudnya pemilihan calon tanpa adanya gangguan dan intervensi dari pihak lain/luar.

2. Asas Umum

Pemilihan bersifat umum yang menjamin seluruh warga negara memiliki dan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu. Ini dapat memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, ras, golongan atau status sosial yang berbeda.

3. Asas Bebas

Sama dengan asas langsung, asas bebas memberikan jaminan kepada seluruh pemilih untuk menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, setiap individu akan dijamin kebebasannya untuk menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani.

4. Asas Rahasia

Dalam asas ini setiap suara yang diberikan oleh pemilih harus tetap dirahasiakan, hal ini dikarenakan untuk menjaga integritas proses pemilu untuk mencegah adanya intimidasi serta pengaruh dari pihak lain.

5. Asas Jujur

Dalam asas ini bertujuan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan pemilu, baik penyelenggara, pemerintahan atau pihak lain agar bertindak dengan jujur dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

6. Asas Adil

Asas ini menjamin setiap pemilu diperlakukan secara setara dan bebas dari bentuk kecurangan, dengan ini dapat terciptanya keadilan dalam pelaksanaan pemilu sehingga setiap suara memiliki nilai yang sama.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber referensi yang berfungsi untuk membandingkan hasil temuan dengan penelitian sebelumnya, hal ini membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis serta membangun kerangka pemikiran agar sistematis. Setelah melakukan tinjauan pada penelitian sebelumnya, maka peneliti akan membandingkan masing-masing dari judul serta masalah yang dibahas.

Penelitian yang dilakukan oleh Miranti dan Suryani (2023) dengan judul “Modalitas Jariah, S.Pd dalam Memenangkan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022”. Hasil dari penelitian ini bahwa modal politik yang membuat beliau berhasil memenangkan pilkades ialah ketokohan Jariah S.Pd di dalam masyarakat, popularitas serta modal ekonomi yang membuat

tim sukses berhasil memberikan calonnya untuk memenangkan pilkades serentak di Kabupaten Merangin tahun 2022 lalu.

Dalam penelitian kedua yang dilakukan oleh A. Mbolang dkk (2020) dengan judul “Modalitas Sosial Politik: Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) Pada Pemilu Legislative di Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019”. Hasil penelitian ini bahwa modalitas politik yang memberikan kemenangan terhadap calon tersebut ialah modal sosial yang tak pernah dibayangkan oleh lawan politik, sehingga mampu menggeser figur kuat lain yang lebih mengandalkan modal politik dan ekonomi semata.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulida Ahmad Yusuf (2022) dengan penelitian yang berjudul “Fenomena Keterpilihan Kepala Desa Berlatar Belakang Militer dalam Pilkades Serentak Kabupaten Pati Tahun 2019”. Dengan hasil penelitian kemenangan kepala desa yang terpilih ini dilatarbelakangi oleh profesi militer, hal ini disebabkan masih minimnya atau kurang kuatnya calon di desa-desa tempat pemilihan karena figure dari militer sendiri masih dikenal sebagai calon yang proposional serta tegas, dengan begitu calon dari militer ini mendapatkan karisma tersendiri dimata masyarakat.

Penelitian lain dengan judul “Analisis Aktualisasi Modalitas Kekuasaan Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Bente, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara)” yang dilakukan oleh La Ode Mayong dkk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal politik dan

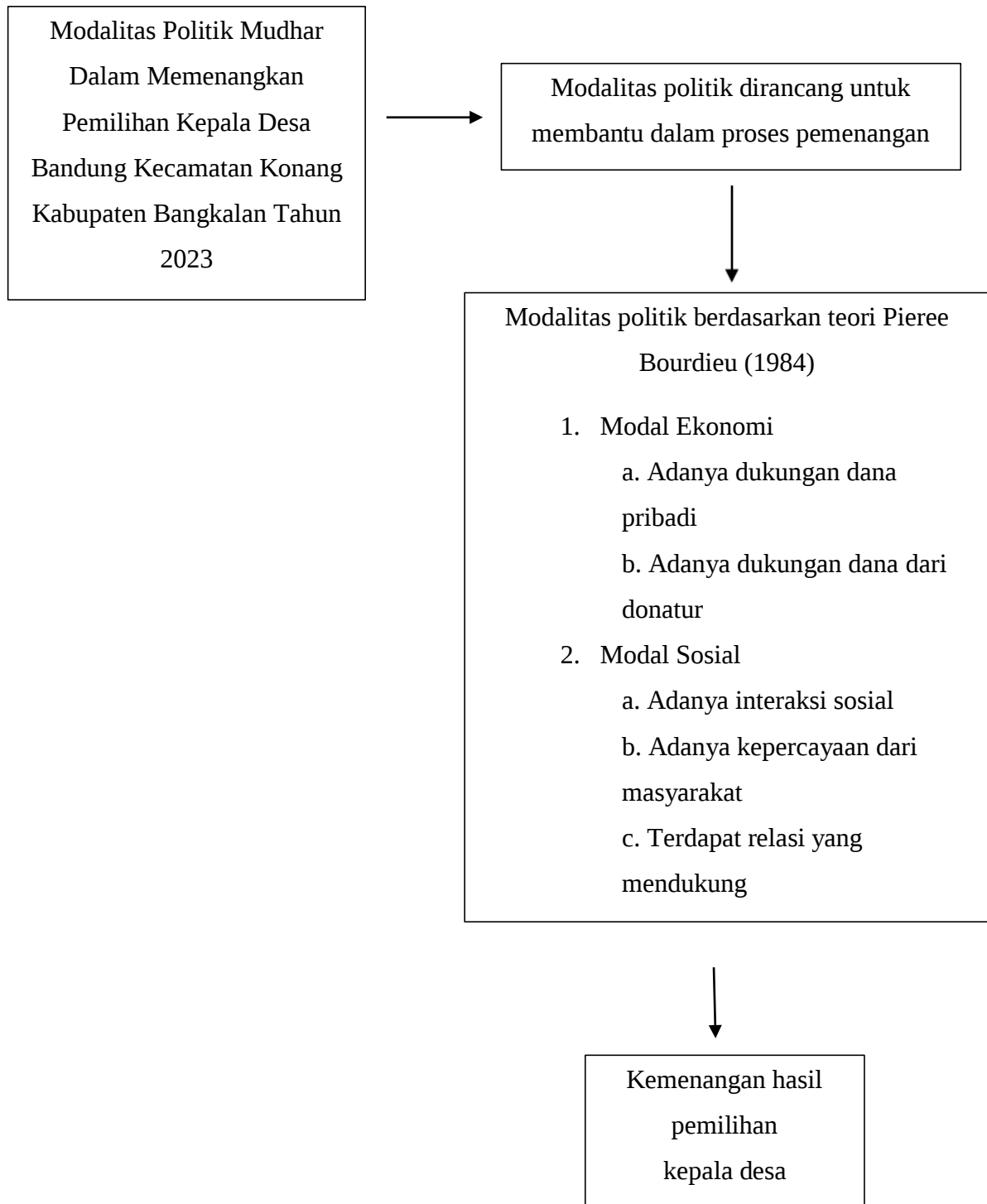
sosial, dibandingkan modal ekonomi dan budaya, menjadi faktor penentu dalam pemilihan walikota desa di Desa Bente. Pak Alimuddin, mempunyai pengalaman dan rekam jejak yang baik selama masa jabatannya, hal itu saja tidak cukup untuk mempertahankan posisinya. Kelemahan Alimuddin terletak pada kurangnya dukungan politik dan kuatnya jaringan sosial. Sebaliknya, Baharuddin mampu memenangkan pemilu dengan mengandalkan kombinasi modal sosial yang kuat dan dukungan politik dari tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa dalam politik tingkat desa, kemampuan membangun hubungan sosial dan memperoleh dukungan politik menjadi kunci kemenangan.

Penelitian lain dengan judul “Modalitas Aktor Milenial Dalam Pemilihan Kepala Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang Tahun 2021” yang diteliti oleh Musran salah satu mahasiswa FISIP di Universitas Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki kesempatan untuk ikut serta dan berhasil dalam kompetisi politik di tingkat desa, selama mereka memiliki dukungan sosial yang tinggi. Modal sosial dibangun melalui perencanaan dan pengembangan yang matang. Tindakan generasi milenial di kalangan masyarakat adat Kaluppini dan peran mereka dalam organisasi lokal serta kegiatan adat dapat memberikan dampak positif bagi Muh. Salata sedang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Kaluppini.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep yang memudahkan peneliti dalam menghubungkan teori dengan fakta serta kajian pustaka untuk dijadikan landasan dalam penulisan karya tulis ilmiah dan memahami fenomena yang diteliti.

Modalitas politik dalam kontestasi arena politik melibatkan beberapa aspek yang saling berkaitan dan mejadi faktor utama untuk memenangkan suatu kontestasi. Dengan tiga modalitas utama yang harus dimiliki oleh seorang kandidat meliputi modal politik (dukungan partai politik), modal ekonomi (penggunaan dana untuk mendukung kemenangan) dan modal sosial (dukungan relasi dan kepercayaan). Strategi kemenangan dimungkinkan menggunakan modal sosial dengan persaingan yang dapat meningkatkan dukungan secara sosial dan modal ekonomi yang lebih mendukung untuk menduduki jabatan kepala desa di Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. dalam penelitian ini kerangka pemikiran disusun sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Bagan Kerangka Berpikir